

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup; Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota.

Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum 1999 dalam empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula, peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, Pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pertama kali dilaksanakan tahun 2014.

Bentuk Demokratis berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang sering disebut Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui pemilukada mulai pertengahan tahun 2005, semenjak itu semua kepala daerah yang habis masa jabatannya harus dipilih melalui proses pemilukada, pemilukada ini bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah, hal ini tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih melalui DPR.

Pilkada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antar pasang kandidat dan pemenang ditentukan oleh suara terbanyak dalam pemilihan. Setiap peserta yang ingin ikut pilkada lewat jalur partai politik harus memiliki 15% suara di DPR sesuai dengan pasal 59 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, bahwa “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD, Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen, salah satu wujud demokrasi adalah dengan calon independen. Dalam pilkada tegas mengatakan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu

identitas penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015, calon perorangan harus kumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% di daerah dengan DPT antara 6.000.000 – 12.000.000 orang, dan 6,5 % di daerah dengan DPT di atas 12.000.000 orang, Pilkada sendiri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu).

Pilkada sendiri dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi, dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam pilkada. Modal ini adalah bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik.

Berbicara kontek Pilkada, dana politik juga sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat menunjang dan diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahapan pilkada oleh kandidat dan tim pemenangan. Modal politik juga menunjukkan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah

gagal menentukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik.

Komunikasi politik menjadi sangat penting, tidak hanya bagi partai politik dan pemerintah namun juga bagi organisasi non partai politik dalam kajian lain diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada. Komunikasi politik ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena komunikasi ini yang akan menentukan beberapa aspek dalam Pilkada.

Dalam Pilkada serentak pada tahun 2018 yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di 117 daerah (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten) merupakan sebuah perhelatan elektorat yang lumayan besar, kenapa tidak karena dari beberapa daerah merupakan daerah yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) salah satunya Jawa Barat. Jawa Barat akan melaksanakan Pilkada di 17 daerah, satu pemilihan untuk provinsi dan pemilihan 16 kota dan kabupaten yakni; Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Puwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon, Garut, Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Banjar, Bekasi, Cirebon dan Kota Sukabumi.

Jika fokus melihat perhelatan elektorat di Jawa Barat, merupakan pilkada yang sangat besar sekali sampai penyelenggaraan (KPU) dalam persiapannya menganggarkan 1,169 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Makanya tidak sedikit Pilkada di Jawa Barat banyak yang melirik karena hampir

seperempat penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, Jawa Barat merupakan provinsi yang banyak penduduk.

Dalam menghadapi Pilkada seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur khususnya di Jawa Barat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh para kandidat peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salah satunya adalah komunikasi politik. Banyak kejadian terkait dengan komunikasi pada perhelatan Pilkada 2018 di Jawa Barat, banyak pula perubahan-perubahan yang cepat terkait dengan pencalonan kandidat Gubernur maupun Wakil Gubernur di Jawa Barat.

Menjadi menarik jika menganalisis tentang komunikasi politik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat, banyak orang tidak menyangka bahwa para pasangan calon yang akan di usung berubah dari apa yang pada awalnya di prediksi. Dari partai pengusung, dari pasangan calon dan dari para tim sukses yang bersatu awalnya menjadi berubah haluan.

Semakin menarik lagi yang penulis akan dalami tentang komunikasi politik Ridwan Kamil di Pilkada 2018 konteknya pemilihan Gubernur, kenapa menarik? Bagaimana tidak menarik, lantaran Ridwan Kamil adalah kandidat paling muda dari antara kandidat yang lainnya termasuk pasangannya sendiri, selanjutnya Ridwan Kamil merupakan satu-satunya orang yang bukan kader partai namun di usung beberapa partai menjadi Calon Gubernur, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan suksesi kemenangan Ridwan Kamil khususnya dalam hal Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Ridwan Kamil.

Bukan dan tidak ingin menjadi kader partai manapun mungkin menjadi salah satu komitmen Ridwan Kamil, karena banyak yang ingin mengusung Ridwan Kamil namun memang tawaran setiap partai ditolak atau tidak diterima karena ada syarat yang sangat berat yakni dengan menjadi kader partai tersebut. Secara terbuka didepan publik secara terang-terangan menerangkan bahwa tidak akan masuk atau menjadi kader partai politik manapun untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Barat.

Penulis merasa, ini sangat cocok dianalisis serta ditelusuri karena memang sangat menarik serta sangat bagus penulis kira, karena kebanyakan partai biasanya akan mengusung jika seseorang mau menjadi kader partai tersebut. Disamping itu juga Ridwan Kamil merupakan kandidat paling muda dari para kandidat lainnya. Makanya dalam beberapa hal juga akan didalami tentang komunikasi politik yang dibangun oleh Ridwan Kamil.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang terpapar dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok studi, yaitu “Bagaimana Komunikasi Politik Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Barat 2018?”

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di kerucutkan dengan memetakan beberapa aspek yang dianggap penting untuk itu di perlukan identifikasi masalah sebagai poin permasalahan yakni:

- a. Bagaimana komunikasi politik yang dibangun Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018?
- b. Bagaimana cara Komunikasi Politik yang dibangun Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian seperti yang terpapar dalam latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk menjelaskan komunikasi Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.
- b. Untuk menjelaskan seperti apa Ridwan Kamil membangun komunikasi politiknya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian ada dua:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan menambah wawasan pada literature-literatur ilmu politik khususnya komunikasi politik.
- 2) Dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan tentang komunikasi seorang sosok tokoh politik dalam membangun komunikasi politiknya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktor politik untuk mengetahui proses dan acara mengkampanyekan dalam membangun komunikasi politik.